

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan, manusia tentunya membutuhkan pasangan untuk memiliki keturunan. Sesuai tugas perkembangan psikososial menurut Erik Erikson (dalam Feldman, 2011: 417), salah satu tahap perkembangan manusia yang harus dicapai ialah *intimacy vs isolation*. Jadi, tugas perkembangannya adalah mencari pasangan hidup dan melakukan komitmen atau ikatan pernikahan dengannya (dalam Wade & Tavris, 2011: 501). Hal itu menjadikan hubungan yang terbentuk di antara pasangan intim secara fisik, intelektual, dan emosional. Jika pada tahap ini manusia tidak dapat melakukan komitmen tersebut, maka manusia mengalami *isolation* (dalam Feldman, 2011: 417) yang ditandai dengan perasaan kesepian dan takut terlibat dalam sebuah hubungan. Hal itu didukung penelitian yang dilakukan Hendrick & Hendrick (dalam Albuquerque, 2010) yang mengatakan jika pernikahan dapat mengurangi rasa kesepian dan menawarkan rekan yang setia.

Manusia juga dikehendaki memiliki pasangan hidup berdasarkan Alkitab pada Kitab Kejadian 2:24, yang mengatakan “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging”. Persatuan dengan lawan jenis inilah yang disebut dengan perkawinan. “Perkawinan merupakan komitmen emosional dan legal dari dua orang yang berbagi tugas, dan sumber-sumber ekonomi” (Olson, DeFrain, & Skogrand, 2011, dalam Afiatin, dkk, 2018: 18). Sementara, perkawinan menurut Kertamuda (dalam Afiatin, dkk, 2018: 18) ialah suatu ikatan janji setia lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dalamnya terdapat tanggungjawab dari kedua belah pihak. Wisnuwardhani dan Mashoedi (dalam Afiatin, dkk, 2018: 18) memaknai perkawinan sebagai sebuah komitmen yang serius antara pasangan dan dengan diadakannya pesta perkawinan mengandung arti bahwa secara sosial pasangan tersebut diakui telah resmi menjadi suami-istri.

Menurut Afiatin (2018: 18) tahap perkawinan adalah tahap yang penting dalam kehidupan karena terjadinya dua hal yaitu tawar menawar identitas dan menegakkan batas-batas keluarga. Dalam artian suami-istri harus mengenali peran yang dijalankan karena menyadari statusnya yang sekarang. Yang harus dilakukan adalah berbagi hal-hal pribadi dan intim dengan pasangan, menyediakan waktu lebih untuk memberi perhatian pada pasangan, berbagi pendapatan, dan kegiatan sehari-hari lain yang sudah menjadi rutinitas (Goldenberg & Goldenberg, 2008, dalam Afiatin, dkk, 2018: 18). Pernikahan pada dua orang memiliki manfaat seperti pada studi terbaru yang mengindikasikan bahwa semakin lama wanita menikah, semakin kecil kemungkinan mereka terkena masalah kesehatan kronis dan semakin lama pria menikah, semakin rendah risiko mereka untuk terkena penyakit (Dupre & Meadows, 2007, dalam Santrock, 2012: 54). Beberapa penelitian (Mastekaasa, 1994; Glenn, 1996; Myers, 2000, dalam Albuquerque, 2010) menemukan bahwa orang-orang yang menikah lebih bahagia dibanding yang tidak menikah, tinggal terpisah, bercerai, atau lajang.

Rumah tangga perlu dijaga agar tetap harmonis dan utuh. Terdapat beberapa aspek agar hubungan dengan seseorang dapat tetap harmonis.

Aspek tersebut antara lain *passion*, *intimacy*, dan *commitment* (Sternberg & Weis, 2008; Sternberg & Weis, 2008; Olson, DeFrain, & Skogrand, 2011: 253). *Passion* yaitu perasaan yang diekspresikan melalui dorongan fisik. *Intimacy* adalah saling berbagi perasaan serta dukungan emosional. Kemudian *commitment* yang merupakan ikatan secara kognitif dengan orang lain.

Selanjutnya, batasan usia menikah yang baik pada perempuan adalah kisaran 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2017). Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena manusia dianggap telah matang secara biologis dan psikologis sehingga dapat berumah tangga dan berpikir dewasa secara rata-rata. Hal ini dilakukan BKKBN (2017) agar pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga nantinya dalam keluarga tercipta hubungan yang berkualitas. Menjaga keharmonisan dalam berumah tangga bukanlah hal yang mudah, karena diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak kala guncangan muncul seperti guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal (dalam BKKBN, 2017).

Pada nyatanya tidak selalu orang menikah dengan orang yang sempurna secara fisik. Pada tahun 2012, menurut Program Perlindungan dan Layanan Sosial (dalam Kementerian Kesehatan RI, 2014) jumlah penyandang disabilitas sebanyak 3.838.985 jiwa. Orang yang menikah dengan penyandang disabilitas fisik menjalani keseharian yang berbeda dengan orang kebanyakan. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Coralia (2015) mengenai *Subjective Well-Being* pada Istri yang Memiliki Pasangan Tunanetra yang menyatakan bahwa para istri seringkali harus menjalankan beberapa tugas suami yang disebabkan keterbatasan suaminya. Meski juga mengalami perlakuan yang

tidak menyenangkan, baik itu dari pihak keluarga maupun lingkungan sosial, namun para istri ini dapat mengatasi dengan baik serta memiliki rasa optimis bahwa keluarganya mampu melewati kondisi semacam ini. Dari hasil penelitian Abed, Nezhad, dan Hatami (2015) yang berjudul *Compatibility and Marital Satisfaction in Disabled Couples Compared to Healthy Ones* ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pasangan yang memiliki kekurangan fisik dengan pasangan yang keduanya sama-sama sehat dalam kesesuaian dan kepuasan pernikahan. Salah satu faktor terpenting dalam mempertahankan rumah tangga mereka yaitu penerimaan terhadap kondisi pasangan.

Berdasarkan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (dalam Kementerian Kesehatan RI, 2014), disabilitas adalah yang mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Susenas (dalam Kementerian Kesehatan RI, 2014) mendefinisikan disabilitas sebagai ketidakmampuan melaksanakan aktivitas atau suatu kegiatan tertentu selayaknya orang normal yang disebabkan kondisi *impairment* (kehilangan/ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Jenis-jenis disabilitas fisik tertinggi yang telah dikumpulkan pada penduduk Indonesia pada tahun 2010 (Kementerian Kesehatan RI, 2014) antara lain kesulitan melihat sebesar 3,05%, kesulitan berjalan atau naik tangga sebesar 1,62%, kesulitan mendengar sebesar 1,58%, diikuti kesulitan mengingat atau berkonsentrasi sebesar 1,44% serta kesulitan mengurus diri sendiri yang sebesar 1,07%. Hal inilah yang

mengakibatkan seorang disabilitas fisik kesulitan dalam menjalankan fungsi tubuh sehari-hari.

Berdasarkan penelitian Sari dan Coralia (2015), orang yang memutuskan menikah dengan seorang penyandang disabilitas fisik pun sedikit dikarenakan risiko yang akan dialami seperti dinilai negatif oleh lingkungan, yang dapat mengakibatkan pasangannya tersebut merasa marah, tersinggung, putus asa, dan bahkan depresi. Orang yang mengalami disabilitas fisik ini juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi di masyarakat sebab batasan yang dimilikinya ini. Berdasarkan data Susenas di tahun 2012 (dalam Kementerian Kesehatan RI, 2014) semakin tinggi tingkat pendidikan, prevalensi penyandang disabilitas menurun. Hasil Riskesdas di tahun 2013 juga mendapatkan bahwa prevalensi disabilitas tertinggi adalah pada kelompok orang yang tidak bekerja, yaitu sebesar 14,4% dan terendah pada kelompok orang yang bekerja sebagai pegawai.

Beberapa penyandang disabilitas fisik juga mengalami ketakutan untuk menikah dikarenakan pandangan orang lain padanya (Rifayani, 2013, Kecemasan Memperoleh Pasangan Hidup pada Penyandang Cacat Tubuh). Menurut Rifayani (2013) mereka mengalami trauma disebabkan penolakan dari sekitar dan terutama orangtua pasangannya dengan alasan pekerjaan, penghasilan, dan kondisi fisik yang dikhawatirkan akan menurun pada keturunannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fidhzalidar (2015) tentang Tingkat Kecemasan Sosial pada Anak yang Mengalami Cacat Fisik di YPAC ditemukan bahwa perempuan memiliki prevalensi lebih tinggi terhadap terjadinya kecemasan sosial. Menurut Fidhzalidar (2015) memiliki kondisi kesehatan yang menarik perhatian seperti cacat dapat meningkatkan perasaan rendah diri serta memicu gangguan kecemasan sosial pada beberapa orang. Kenyataannya terdapat juga

penyandang disabilitas fisik yang sukses dalam pekerjaannya. Hal itu dibuktikan oleh salah satu pelukis difabel, Sadikin Pard yang mampu membuat lukisan dengan harga belasan hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, ada satu buah lukisannya yang dijual seharga Rp 240 juta rupiah (Sudharma, 2018).

Meski memiliki pasangan penyandang disabilitas fisik bukanlah hal yang mudah, beberapa orang tetap memutuskan menikah dengan orang yang mengalami disabilitas fisik dan tidak begitu memikirkan pendapat orang lain seperti informan An. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan informan AN. Berikut kutipan pernyataan informan:

“Malah, jadi saya bisa dikatakan aku bahagia sama rumahtangga ini gitu.” (AN; 40 th)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa AN menerima pernikahan dengan pasangannya yang mengalami kesulitan berjalan dan mengatakan bahwa dirinya bahagia dengan rumah tangganya. Seseorang dikatakan memiliki *subjective well-being* ketika merasa bahagia dengan hidup yang dimiliki.

Subjective Well-Being menurut Snyder dan Lopez (2002: 63) adalah evaluasi kognitif seseorang terhadap hidupnya. Evaluasi tersebut mencakup reaksi emosi positif dan negatif terhadap kejadian dalam hidupnya dan kepuasan pada hidupnya. Dengan kata lain yaitu mengalami emosi positif yang tinggi, perasaan negatif yang rendah, dan kepuasan yang tinggi pada hidupnya. Sementara berdasarkan penjelasan Diener, Oishi, & Lucas (dalam Maddux, 2018: 3) *subjective well-being* merupakan analisis ilmiah tentang bagaimana seseorang mengevaluasi hidupnya pada periode

tertentu hingga satu tahun terakhir serta reaksi emosional seseorang pada suatu kejadian, perasaannya, dan penilaian tentang kepuasan hidupnya, pemenuhan, dan kepuasan pada domain seperti pernikahan dan pekerjaannya. *Subjective well-being* memiliki dua aspek, antara lain elemen kognitif dan aspek afektif (dalam Albuquerque, 2010).

Aspek kognitif ialah apa yang orang pikirkan tentang kepuasan hidupnya secara menyeluruh dan di beberapa bidang (contoh spesifiknya adalah pekerjaan, hubungan, dan sebagainya). Sementara itu, aspek afektif merujuk pada afeksi positif ketika emosi, suasana hati, dan perasaan yang dialami adalah hal yang menyenangkan. Sebaliknya, afeksi negatif terjadi saat emosi, suasana hati, dan perasaan yang dialami tidak menyenangkan seperti rasa bersalah, kemarahan, rasa malu, dan sebagainya (dalam Albuquerque, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sari dan Coralia (dalam penelitian “Subjective Well-Being Pada Istri yang Memiliki Pasangan Tunanetra, 2015) ditemukan bahwa wanita yang memiliki suami tunanetra yang memiliki tingkat *subjective well-being* tinggi menilai bahwa hidupnya memuaskan dan membahagiakan. Sementara istri yang memiliki tingkat *subjective well-being* rendah adalah pribadi yang sangat memikirkan tentang penilaian lingkungan mengenai dirinya sehingga sekalipun ia memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi, tapi penilaian negatif dari lingkungan mengenai keluarganya terutama suaminya, membuatnya merasa marah, tersinggung, putus asa, dan bahkan depresi.

Memiliki *subjective well-being* ketika membentuk sebuah rumah tangga dengan orang yang menyandang disabilitas fisik adalah hal yang penting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bhagchandani (2014) yang berjudul “*The Effects of a Visual Disability on Marital Relationship*”

diperoleh bahwa pernikahan dengan orang yang menyandang disabilitas fisik dapat mempengaruhi pernikahan seperti contohnya penerimaan terhadap kondisi disabilitas pasangan, merasa kehilangan identitas dan harga diri, terjadinya kesalahpahaman dan masalah komunikasi antarpasangan, perubahan dalam rutinitas keseharian, peran serta tanggungjawab dalam rumah tangga. Meski terjadi beberapa kesulitan di atas, namun hubungan mereka dapat memperkuat ketahanan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh cobaan. Kebanyakan partisipan dalam penelitian tersebut tetap melanjutkan atau melewati tingkat kedekatan yang selalu mereka bagi sebelum terjadinya tanda-tanda disabilitas. Untuk beberapa partisipan, senyatanya kondisi disabilitas fisik pasangan semakin meningkatkan kedekatan hubungan pasangan tersebut (dalam Bhagchandani, 2014).

Oleh karena perkawinan adalah hubungan sehidup-samati dan berjalan sepanjang sisa hidup dua insan yang telah bersatu, perkawinan diharapkan dapat stabil dan bertahan (Afiatin, 2018: 18). *Subjective well-being* terdiri dari aspek kepuasan hidup yang membuat seseorang dapat menerima serta puas memiliki pasangan apa adanya meski dengan kondisi disabilitas fisik (dalam Maddux, 2018: 3). Selain menerima kekurangan (terutama fisik) pasangan, seseorang yang memiliki *subjective well-being* diharapkan dapat menunjukkan afeksi positif dengan bersyukur dan gembira pada keluarga kecil yang telah dibentuknya bersama pasangan disabilitas fisik. Kemudian menepis atau meminimalisir afeksi negatif yang terlebih berasal dari eksternal atau masyarakat seperti respon negatif orang-orang ketika melihat pasangan yang mengalami disabilitas fisik. Pada akhirnya, jika semua hal tersebut dapat dilakukan, akan terbentuklah rumah tangga

yang bahagia. Meski kondisi pasangan tidak sempurna, tetaplah hidup kedua orang tersebut berakhir bahagia dan bertahan.

Dengan melihat fenomena di atas maka penelitian ini penting dilakukan karena pada nyatanya penelitian tentang orang yang memiliki pasangan disabilitas fisik lebih banyak mencakup penelitian kuantitatif dibanding secara kualitatif. Jumlah penelitian pada orang yang memiliki pasangan penyandang disabilitas fisik di Indonesia juga terbatas. Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana gambaran *Subjective Well-Being* pada orang yang memiliki pasangan penyandang disabilitas fisik.

1.2 Fokus Penelitian

Bagaimana gambaran *Subjective Well-Being* pada orang yang memiliki pasangan penyandang disabilitas fisik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara ilmiah gambaran *Subjective Well-Being* pada orang yang memiliki pasangan penyandang disabilitas fisik melalui aspek-aspek serta faktor yang memprediksi adanya *Subjective Well-Being* yang dimiliki seorang dengan pasangan penyandang disabilitas fisik yang berada di Surabaya dan Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan psikologi, khususnya akan teori-teori psikologi positif

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi informan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi penelitian seputar kesejahteraan yang dimiliki orang dengan pasangan penyandang disabilitas

2. Bagi orang yang memiliki pasangan penyandang disabilitas fisik

Diharapkan dari penelitian ini orang-orang lainnya yang memiliki pasangan penyandang disabilitas fisik dapat mengerti keadaan pasangannya serta menerima pasangannya

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta pedoman kepada penelitian selanjutnya